

**PERSEPSI MASYARAKAT DAYAK MERAP DAN PUNAN TENTANG  
PENTINGNYA HUTAN DI LANSEKAP HUTAN TROPIS, KABUPATEN  
MALINAU, KALIMANTAN TIMUR**

*Dayak Merap and Punan People's Perception of the Importance of Forest in a Tropical  
Landscape, Malinau, East Kalimantan*

NINING LISWANTI<sup>1</sup>, ANDRY INDAWAN<sup>2</sup>, SUMARDJO<sup>3</sup>, DOUGLAS SHEIL<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*This study's emphasis was on Dayak Merap and Punan people's perception of the importance of forest. A participatory approach using scoring exercises was completed with seven forest dwelling communities in the tropical landscape of Malinau, East Kalimantan. The findings suggest that un-logged forest was the most important land category for Dayak people. It provides for their livelihoods and well-being both directly and indirectly. 'Forest' has the heritage values and contains an abundance of valued and significant plants and animal. For the future, 'forest' is predicted to remain important for local people mainly for timber. Forests are exceptional in comparison with other land types in providing a wide range of highly valued goods and services, in most cases to a greater degree than other land types. In addition, the value of forest decreases less with apparent distances. However, logged forest is related as much less important, allowing us to consider improvements in forest management that might better protect local values.*

*Key words: Local people's perception, importance, participation, rapid appraisal, weighting, scoring exercises, landscape, tropical rain forest, Malinau district.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati (*KEHATI*) yang amat kaya dan khas, dan telah menjadi andalan bagi sebagian besar pembangunan di Indonesia, contohnya di Kalimantan Timur. Pada tahun 1987, wilayah ini telah menghasilkan 21% pendapatan ekspor Indonesia, yang berasal dari cadangan sumberdaya alam seperti hutan, minyak gas, batu bara, dan mineral-mineral yang lain (MacKinnon *et al.*, 1996). Eksploitasi kekayaan alam pada saat itu, nampak masih belum memperhitungkan aspek kelestarian. Di sisi lain,

---

<sup>1</sup> Research Assistant Biodiversity Program, Center for International of Forestry Research, Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680.

<sup>2</sup> Dosen Senior dan Peneliti pada Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Kampus Darmaga P.O. Box 168 Bogor.

<sup>3</sup> Staf Pengajar, Fakultas Pertanian IPB, Kampus Darmaga, Bogor

<sup>4</sup> Kepala Program Biodiversity, Center for International of Forestry Research, Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680.

potensi *KEHATI* yang tinggi di wilayah ini masih banyak yang belum terungkap, salah satunya adalah daerah Malinau di Kalimantan Timur ini. Diduga wilayah ini mengandung kekayaan species hewan dan tumbuhan yang berguna (MacKinnon *et al.*, 1996; Wulffraat dan Samsu, 2000), namun hingga saat ini masih sedikit diketahui keadaan biologinya.

Masyarakat dayak Kenyah, Merap dan Punan, dan beberapa kelompok minoritas masyarakat dayak pendatang, merupakan penghuni desa-desa di sepanjang sungai Malinau. Suku Dayak Punan dan Merap dipilih dalam kajian ini, karena kedua suku tersebut memiliki budaya yang berbeda dan menonjol di daerah aliran sungai Malinau. Dayak Merap dikenal merupakan suatu kelompok yang berpengaruh pada konteks lokal, sedangkan Dayak Punan secara politik nampak kurang berpengaruh. Persamaan kedua suku tersebut adalah dalam menggunakan sumberdaya hutan yang ada di lansekap mereka. Kedua suku tersebut berburu, menangkap ikan, mengolah kebun dan ladang, dan memanfaatkan hutan untuk mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, bahan bangunan serta kerajinan tangan. Adapun perbedaan utama kedua suku tersebut adalah bahwa Merap lebih menekankan pada pertanian padi/sawah sementara Punan lebih menekankan pada aktivitas berbasis hutan (Sheil *et al.*, 2002, Uluk *et al.*, 2001).

Aktivitas para *stakeholder* telah merubah kondisi hutan di wilayah Malinau. Pada masa pemerintahan orde baru, wilayah ini telah diperuntukkan sebagai hutan produksi dan telah dialokasikan pada perusahaan komersil. Namun sebagian dari wilayah tersebut telah diakui dan dibagi oleh masyarakat lokal menjadi hak tradisional mereka (Sheil *et al.*, 2002). Setiap stakeholder memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap *KEHATI* yang berbeda-beda. Masyarakat lokal menggunakan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara perusahaan kayu dan batubara menggunakan hutan untuk mendapatkan keuntungan. Situasi ini memberikan tekanan pada hutan di wilayah Malinau, yang saat ini telah terkena dampak problema klasik ‘pembangunan vs kelestarian’. Munculnya konflik,

khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan lahan antara perusahaan komersil, pemerintah dan masyarakat lokal, menjadi kendala utama pelaksanaan konservasi *KEHATI* di wilayah ini. Kurangnya keberhasilan upaya pelaksanaan konservasi yang bersifat *top-down* dan implementasi kebijakan dan peraturan perundangan tentang sumberdaya hutan yang sering mengabaikan masyarakat lokal, serta meningkatnya degradasi lahan dan hutan, semakin mempersulit pelaksanaan konservasi sumberdaya alam di lansekap Malinau.

Penelitian-penelitian mengenai keanekaragaman hayati sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini hasil-hasil penelitian tersebut sering tidak secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, tapi terlebih dahulu melalui para pembuat kebijakan, sehingga manfaat dari hasil penelitian keanekaragaman hayati tersebut masih kurang dirasakan oleh masyarakat lokal. Banyak orang luar belum memahami apa pentingnya hutan bagi masyarakat lokal. Para pembuat keputusanpun masih kesulitan menggunakan data spesies tanaman hasil penelitian *KEHATI* karena nampaknya masih dianggap kurang bermanfaat (Sheil, 2002).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat lokal khususnya Dayak Merap dan Punan mengenai kebutuhan dan kepentingan mereka pada hutan dengan menggunakan metode skoring sederhana. Kajian ini akan mengungkapkan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang belum diketahui oleh pihak luar dan diharapkan hasilnya dapat dipergunakan sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan konservasi *KEHATI* secara *bottom-up*, melalui partisipasi masyarakat lokal.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

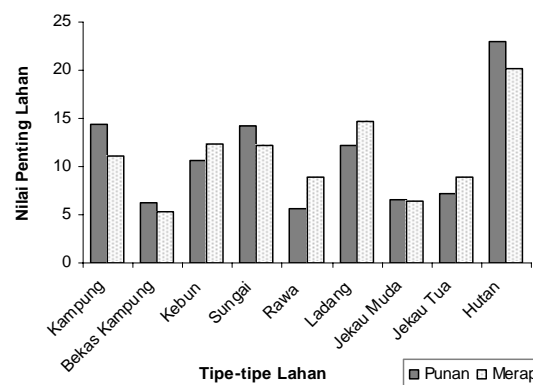
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malinau, terletak pada 2<sup>o</sup>45' – 3<sup>o</sup>21' LU dan 115<sup>o</sup>48' – 116<sup>o</sup>34' BT, dengan luas sekitar 2000km<sup>2</sup>. Pemilihan desa dilakukan secara stratifikasi dengan strata utama yaitu suku Merap dan Punan. Desa Merap diwakili oleh Gong Solok, Langap dan Paya Seturan, sedangkan desa Punan diwakili oleh Punan Rian,

Liu Mutai, dan Long Jalan. Desa Laban Nyarit mewakili suku Punan dan Merap. Kegiatan pemberian skor secara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan menggunakan *Pebble Distribution Method* (PDM) digunakan dalam kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pentingnya Hutan bagi Suku Merap dan Punan

Bagi suku Merap dan Punan, ‘hutan’ merupakan tipe lahan paling penting (Gambar 1), baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan bermanfaat langsung karena menyediakan hasil-hasil hutan yang dapat dikonsumsi secara langsung, sedang manfaat hutan secara tidak langsung yaitu dengan menyediakan lahan-lahan untuk berladang dan berkebun sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pentingnya hutan bagi masyarakat Merap terutama untuk kebutuhan bahan material bangunan, konstruksi perahu, dan peralatan. Sementara bagi masyarakat Punan, hutan sangat penting terutama untuk diambil rotannya sebagai bahan anyaman, atau sebagai bahan material bangunan rumah dan perahu. Untuk tipe lahan-lahan yang lain seperti bekas kampung, rawa, jekau muda (bekas kawasan budidaya yang telah diabaikan kurang dari 10 tahun) dan jekau tua (bekas kawasan budidaya yang telah diabaikan lebih dari 10 tahun), dinilai kurang penting bagi kedua suku tersebut karena umumnya hanya dikunjungi sekali-sekali saja.



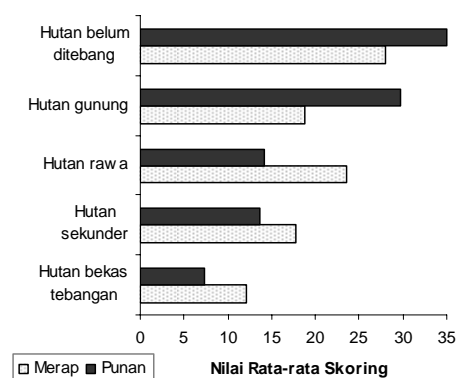
Gambar 1. Nilai rata-rata skoring untuk tipe-tipe lahan pada suku Merap dan Punan

Masyarakat Merap di Langap mencatat pentingnya daerah sarang burung di kawasan hutan sebagai suatu perdagangan yang menguntungkan, namun desa lain seperti Paya Seturan dan Gong Solok mempunyai alasan berbeda dalam menilai hutan. Mereka mengemukakan bahwa pembebasan lahan untuk ladang di daerah hutan membuat mereka mendapatkan pengakuan kepemilikan. Isu hak milik untuk mendapatkan teritorial desa yang lebih besar telah meningkat dengan pesat dan menjadi perdebatan bagi pemerintah lokal dan pusat. Saat ini, suku Merap merasa perlu melakukan perlindungan hutan dari kegiatan eksploitasi maupun perladangan, mengingat pentingnya hutan bagi anak-anak mereka di masa depan. Hasil-hasil hutan yang umumnya berasal dari hutan primer, juga diupayakan hanya di ambil seperlunya saja, sehubungan dengan lokasinya yang jauh dari desa. Jadi untuk sumber pencaharian mereka sehari-hari, lebih menggantungkan pada kegiatan berladang dan berkebun. Peraturan adat telah membantu upaya-upaya pelaksanaan perlindungan hutan, seperti lokasi sarang burung walet di Langap yang dilindungi dan di larang oleh adat untuk dimanfaatkan. Bahkan di Laban Nyarit sengaja membuat hutan lindung untuk cadangan masa depan.

‘Hutan’ bagi masyarakat Punan di Liu Mutai dan Long Jalan lebih ditekankan untuk di konsumsi langsung dengan mengambil sumber makanan liar baik hewan maupun tumbuhan. Berdasarkan penjelasan para informan, dapat dilihat bahwa status hutan sedang berubah. Banyak informan menjelaskan bahwa kegiatan penebangan kayu dan tambang batubara telah menurunkan sumberdaya hutan dan mengurangi akses mereka ke hutan. Suku Punan memandang hutan merupakan bagian dari mereka dan memiliki arti penting sehubungan dengan nilai-nilai sejarah yang tersembunyi dan selalu dijaga agar tidak dirusak oleh pihak luar. Misalnya pada tradisi menyimpan mayat dalam guci (tempayan besar) dan menguburnya di hutan. Guci yang sangat bernilai itu sering hilang dicuri sehingga tabu bagi mereka membicarakan hal ini dan tetap dirahasiakan untuk melindungi lokasi kuburan di

hutan. Hutan juga menjadi tempat persembunyian orang Punan (di bawah batu, di gua, atau di atas pohon). Jasad orang-orang Punan jaman dulu tersimpan rapi di dalam hutan. Aturan adat melarang pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan pertanian disekitar lokasi kuburan dengan radius  $\geq 1$  hektar.

Untuk tipe-tipe hutan, baik suku Merap maupun Punan sangat mengutamakan ‘hutan belum ditebang’. Hutan yang belum ditebang merupakan penutupan lahan terpenting (Gambar 2), karena menyediakan banyak tumbuhan dan hewan yang bermanfaat. Peraturan adat dalam memanfaatkan hutan diberlakukan di sini, terutama pengambilan kayu yang dibatasi hanya untuk membuat rumah, bangunan serta peralatan. Menurut persepsi lokal, di hutan yang belum ditebang, umumnya sumberdaya hewan dan tumbuhan masih berlebihan. Pengambilan hasil hutan di hutan primer ini diatur lembaga adat, jadi diambil seperlunya. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan, peralatan, bahan bangunan rumah atau kegunaan lainnya menurut kebutuhan masing-masing. Hutan ini juga menjadi pilihan utama pada saat masyarakat berencana membuat ladang. Alasan utama selain memiliki tanah yang subur, lokasinya lebih dekat dengan desa.



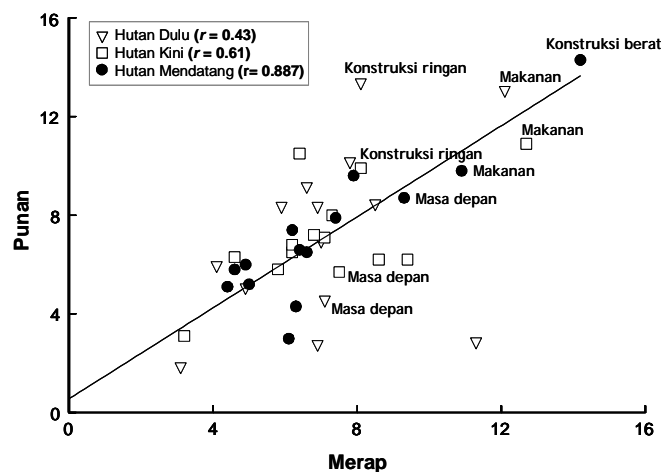
Gambar 2. Nilai rata-rata skoring untuk tipe-tipe hutan pada suku Merap dan Punan.

Hal yang cukup mencolok disini adalah pada ‘hutan bekas tebangan’ hampir seluruh responden memberikan skor yang rendah (Gambar 2). Tipe hutan ini sangat tidak diminati oleh masyarakat lokal dan secara keseluruhan mendapat skor paling kecil (9.9). Akibat

ditebangnya pohon-pohon yang bernilai ekonomis, masyarakat kehilangan nilai-nilai penting yang ada di hutan ini. Sistem silvikultur yang diterapkan dalam kegiatan penebangan hutan telah menyebabkan banyak spesies-spesies berguna dan memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi hilang. Terutama dengan adanya peraturan pada sistem tebangan tersebut, yang mengharuskan untuk melakukan pembersihan pada tumbuhan bawah. Jenis-jenis tumbuhan bernilai seperti *gaharu*, rotan, tanaman obat, sumber makanan hewan liar, sudah tidak mungkin didapatkan lagi pada hutan-hutan bekas tebangan. Kegiatan penebangan hutan tersebut, menurut suku Punan dan Merap, telah menurunkan jumlah spesies kayu bernilai dan sumber makanan yang penting bagi mereka seperti sagu hutan, serta mengurangi akses masyarakat untuk berburu yang merupakan salah satu mata pencaharian dan juga tradisi bagi kedua suku tersebut. Jadi dampak dari kegiatan logging terkait erat dengan berkurangnya sumberdaya pokok, aksesibilitas, dan hak mengelola oleh masyarakat lokal (Sheil *et al*, 2003).

### Pentingnya Hutan Dulu, Kini, dan Mendatang bagi Suku Merap dan Punan

Masyarakat Merap dan Punan memiliki persepsi yang tidak sama saat membicarakan penggunaan hutan pada kurun waktu yang berbeda, umumnya berdasarkan pada prioritas dan pilihan masing-masing (Gambar 3). Perbedaan pilihan ditunjukkan oleh korelasi yang rendah untuk hutan ‘dulu’ (0.433) dan ‘kini’ (0.613). Namun kedua suku menunjukkan korelasi yang kuat pada hutan ‘mendatang’ yang berarti bahwa mereka memiliki kesamaan pilihan (0.887).



Gambar 3. Korelasi antara suku Merap dan Punan untuk nilai penting hutan pada kurun waktu yang berbeda (hutan ‘dulu’, ‘kini’, dan ‘mendatang’).

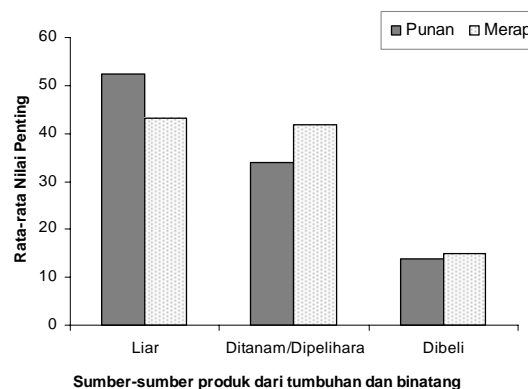
Pada Gambar 3, ditunjukkan bahwa kategori ‘makanan’ merupakan kategori terpenting bagi Suku Punan and Merap dari hutan diwaktu ‘dulu’, ‘kini’, dan ‘mendatang’. Ditegaskan oleh responden bahwa pada hutan waktu ‘dulu’, aktivitas perusahaan masih sedikit, sehingga sumber makanan berlimpah. Prioritas selanjutnya bagi Merap adalah pada bahan bangunan rumah, sedang Punan lebih mengutamakan bahan konstruksi ringan untuk membuat pondok di ladang. Hasil yang menarik juga diperoleh dari analisis dimana Punan dan Merap memiliki korelasi yang tinggi sehubungan dengan kepentingan mereka dimasa mendatang (Gambar 3). Adanya pola yang sama pada kepentingan hasil hutan, terutama pada ‘makanan’, ‘bahan konstruksi bangunan’, ‘dapat dijual’, dan ‘akan datang’. Sagu liar atau *palm starch* adalah makanan yang paling disukai, dan kayu ‘*ulin*’ atau *Eusideroxylon zwagerii* adalah species yang paling disukai untuk bahan bangunan.

Memahami suku Punan yang telah mengurangi pola hidup nomadik, maka mengetahui kepentingan mereka pada kategori bahan bangunan adalah hal yang logis. Beberapa grup Punan menjelaskan bahwa alasan mereka untuk pola hidup yang lebih menetap adalah berkaitan dengan keterbatasan lahan dan untuk memberikan rasa aman bagi keluarga mereka. Kategori ‘dapat dijual’ juga menjadi prioritas, berkaitan mata pencaharian mereka sebagai pemburu *gaharu* yang memberikan pendapatan signifikan. Di Long Jalan, harga gaharu dengan kualitas terbaik tahun 2002 mencapai Rp5-6 juta per kg (USD \$455-545) (juga di catat dalam Wollenberg, 2001).

### **Pentingnya Sumber-sumber Produk Hutan bagi Suku Merap dan Punan**

Sumber-sumber produk (tumbuhan maupun binatang) dari hidupan liar masih menjadi pilihan utama bagi suku Punan, sedangkan suku Merap memberikan pilihan yang seimbang antara sumber produk yang berasal dari hidupan liar dan sumber produk yang

sengaja mereka tanam atau dipelihara (Gambar 4). Sumber-sumber produk dibeli kurang diminati oleh kedua suku. Pada saat ini suku Merap yang ada di hilir telah merasakan bahwa lokasi hutan sudah semakin jauh seiring dengan meningkatnya kegiatan HPH dan pertambangan, serta aktivitas perladangan oleh masyarakat lokal di kawasan hilir, sehingga menyebabkan kurangnya berbagai tumbuhan dan hewan liar yang sangat berguna bagi mereka.

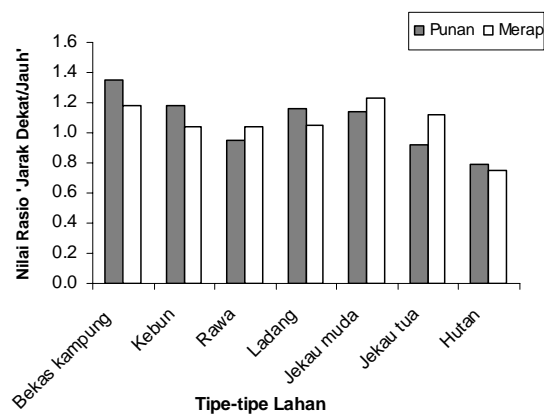


Gambar 4. Hasil kegiatan distribusi kerikil untuk sumber-sumber hasil (produk) yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk semua desa sampel

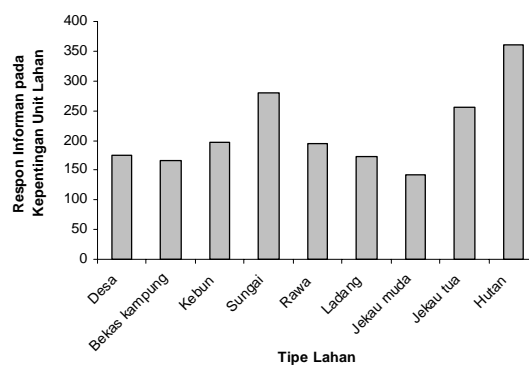
### **Pengaruh Jarak Unit Lahan dan Kategori Kepentingan pada Pentingnya Hutan**

Atribut ‘jarak’ dan ‘kategori kepentingan’ dipertimbangkan berpengaruh pada penilaian masyarakat lokal tentang pentingnya hutan di lansekap mereka. Pengaruh jarak pada pentingnya tipe-tipe lahan (Gambar 5), ditunjukkan oleh besarnya nilai rasio jarak. Nilai hutan nampak menjadi sedikit berkurang dengan meningkatnya nilai rasio. Bertambahnya jarak yang harus tempuh, umumnya berpengaruh pada terjadinya perbedaan kepentingan pada lahan tertentu . Jauhnya jarak menuju lokasi hutan (umumnya terjadi di desa-desa di hilir), menyebabkan nilai hutan menjadi sedikit berkurang, terutama dalam menyediakan sumber-sumber produk yang diminati oleh masyarakat lokal. Namun beberapa informan menjelaskan bahwa pada jarak jauh, mereka masih mempunyai akses untuk mengambil hasil hutan seperti *gaharu*, rotan atau hewan liar.

Setiap tipe lahan memiliki nilai kegunaan yang berbeda-beda. Hasil kegiatan skoring, Gambar 6, menunjukkan respon seluruh grup informan dalam menilai lahan dan hutan berdasarkan kategori kepentingan. Hampir semua responden memberikan respon bahwa hutan merupakan tipe lahan yang dapat memberikan jasa untuk semua kategori kepentingan. Respon paling tinggi diberikan pada lahan hutan. Jekau muda merupakan tipe lahan yang paling sedikit mendapatkan respon dilihat dari kategori kepentingan yang ada pada lahan tersebut. Berdasarkan pada kategori kepentingan, maka yang terpenting dari hutan bagi Merap dan Punan adalah untuk kategori ‘makanan’, ‘anyaman’ dan ‘bahan berburu’, karena pada kategori kepentingan tersebut, sangat umum dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Beberapa barang anyaman yang sangat berguna bagi masyarakat lokal dan dapat memberikan tambahan penghasilan adalah keranjang, tikar, bahan pengikat, dan topi.



Gambar 5. Rata-rata nilai rasio jarak suku Punan dan Merap di setiap tipe lahan di seluruh desa survei.



Gambar 6. Nilai respon informan (suku Punan dan Merap) untuk Kepentingan Unit Lahan di seluruh desa survei.

### **Pentingnya Tipe Lahan Lain bagi Suku Merap dan Punan**

Dengan berkurangnya sumber pencaharian dari hutan, maka ‘ladang’ menjadi pilihan masyarakat Merap dan Punan setelah ‘hutan’ (Gambar 1), yang umumnya digunakan untuk menanam tanaman pertanian. Ladang, juga kebun dan jekau muda, sering di pakai untuk menangkap binatang buruan, terutama babi (*Sus barbatus*) dan rusa (*payau*, *Cervus unicolor*; *pelanuk kancil*, *Tragulus napu*). Fenomena perubahan penggunaan hutan menjadi ladang merupakan hal umum bagi desa-desa di hilir sungai Malinau.

‘Sungai’ bagi kedua suku dipandang sebagai lahan yang memiliki nilai penting tinggi setelah hutan. Umumnya digunakan sebagai sumber ‘makanan’, misalnya: berbagai jenis ikan, namun jenis ikan yang paling disukai adalah *Tor tambra*, atau dijadikan ‘tempat berburu’ hewan-hewan liar seperti ikan, labi-labi, kura-kura, belut, biawak dan lain-lain. Sungai juga digunakan untuk mendapatkan ‘kayu bakar’, ini terkait dengan banyaknya kayu-kayu yang hanyut dari hulu dan banyak terdampar di tepi-tepi sungai yang lokasinya dekat dengan rumah mereka.

‘Kebun’ sedikit kurang penting dari ladang dan hanya digunakan untuk menanam sayuran (jagung, ubi, singkong, ketimun, kacang panjang, cabe, bawang dll). Namun di desa Merap di Langap dan Gong Solok, kebun dipakai untuk mengembangkan tanaman tahunan (kopi, vanila, coklat), sehingga memberikan pendapatan lebih baik.

Istilah jekau, digunakan untuk lahan-lahan yang dipakai untuk ladang. ‘Jekau muda’ banyak dimanfaatkan untuk mendapatkan kayu bakar, menanam sayur-mayur dan mengambil tanaman liar yang tumbuh di lahan ini untuk dimakan (jamur, paku-pakuan, dan tunas bambu atau ‘*umbut*’), sedangkan ‘jekau tua’ digunakan kembali menjadi ladang, terutama setelah lahan ini berumur 15 tahun, dimana kesuburan tanah telah kembali (Basuki dan Sheil 2003; Uluk *et al* 2001).

## **Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Merap dan Punan**

Sejak dulu masyarakat lokal selalu menghubungkan hutan dengan kepercayaan spiritual. ‘Hutan’ adalah tempat kuburan keramat, atau tempat untuk bersembunyi dari bahaya. Hutan memberikan sumberdaya dan lahan untuk berladang seperlunya. Namun saat ini, persepsi mereka tentang hutan telah berubah. ‘Hutan’ tidak sesederhana lagi sebagai sumber kehidupan, namun lebih dari pemenuhan kebutuhan akan lahan. Nampak bahwa ini terjadi karena adanya tekanan dan minat dari orang luar. Konversi hutan menjadi penggunaan lain tidak dapat dihindari. Beberapa upaya telah dilakukan oleh masyarakat lokal untuk melindungi hutan. Misalnya dengan peraturan adat yang melarang untuk berladang atau mengambil sumberdaya pokok di tempat tertentu, sehingga hutan dapat digunakan terus menerus. Aturan adat yang berlaku turun temurun, dalam bentuk kepercayaan, adat dan tradisi dipakai dalam pengelolaan hutan secara lestari (Sardjono and Samsuudin 2001). Sayangnya, hukum adat umumnya tidak tertulis, sehingga sering menciptakan konflik dalam pelaksanaannya.

## **Perubahan Sosial dalam Masyarakat Dayak Merap dan Punan**

Terjadinya proses pembangunan dan adanya intervensi-intervensi dari pihak luar di wilayah hutan Malinau, telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial bagi kedua suku yang berada di wilayah ini. Nilai-nilai budaya dan adat yang telah dipegang teguh secara turun-temurun mengalami keluruhan. Masyarakat lokal dihadapkan pada pilihan yang sulit antara memegang teguh peraturan adat dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Desakan ekonomi dan keinginan keinginan untuk mendapatkan pengakuan hak milik atas lahan mereka, membuat terjadinya perubahan-perubahan yang tak terelakkan, serta menjadi penyebab lunturnya nilai-nilai warisan yang telah mereka pegang selama ini.

Secara tradisional, setiap desa mempunyai teritorial hutan (Sellato, 2001). Namun wilayah hutan tersebut kenyataannya tumpang tindih dengan wilayah stakeholder komersil dan konflik kepemilikan lahan yang terjadi, hingga kini belum terselesaikan. Untuk kasus Malinau, masyarakat lokal menunjuk kegiatan logging sebagai penyebab utama pada pengurangan sejumlah sumberdaya liar, karena pada sistem logging terdahulu, banyak spesies berguna yang musnah termasuk rotan dan anakan kayu (Sheil et al 2003). Konversi hutan menjadi ladang adalah penyebab yang lain. Ini adalah contoh ketidakberdayaan masyarakat lokal pada legalitas yang berlaku, sehingga untuk mengukuhkan hak milik lahan secara adat, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan adat

### **Pentingnya Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Konservasi KEHATI**

Penyebab lain ketidaksuksesan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati adalah karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, peraturan yang tumpang tindih dan perbedaan prioritas pada pemerintah pusat dan lokal. Hal tersebut telah menjadi kendala pada upaya pelaksanaan konservasi, sehingga sudah seharusnya bila upaya konservasi ini mulai mempertimbangkan peran masyarakat lokal dan kepentingan mereka. Apabila kepentingan masyarakat lokal ini tidak dipahami oleh pihak-pihak luar atau para pembuat kebijakan, maka hal itu dapat mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan penurunan nilai-nilai kehati yang tidak dapat dihindari, akibat kegiatan konsesi dan masyarakat lokal itu sendiri. Solusi semacam itu, bagaimanapun, memerlukan suatu penelitian ilmiah dan pengembangan lebih lanjut.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Ada dua kesimpulan utama yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, yaitu: 1). ‘Hutan’, yang dicirikan sebagai hutan yang belum ditebang atau hutan primer, menurut persepsi masyarakat lokal adalah tipe lahan paling penting. Masyarakat lokal menilai bahwa pentingnya hutan primer, adalah didasarkan pada beberapa hal berikut: a) sebagai sumber

sumber mata pencaharian baik langsung maupun tidak langsung, b). adanya nilai-nilai historis yang harus terus dipertahankan secara turun-temurun, c). memiliki kelimpahan sumberdaya yang sangat bernilai seperti tumbuhan dan hewan. Lahan-lahan lain menurut pandangan lokal mempunyai tingkat kepentingan lebih rendah dibandingkan dengan lahan hutan. 2). Bahwa ‘kategori kepentingan’ atau tipe kegunaan yang lebih spesifik dan ‘jarak’ suatu unit lansekap dari desa mereka, dapat dipakai untuk menentukan adanya variasi-variasi yang mendasari terjadinya tingkat dan tipe kepentingan masyarakat lokal pada hutan. Terkait dengan kondisi aktual saat ini, masyarakat lokal mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber-sumber produk yang bernilai di hutan disekitar tempat tinggal mereka. Akibatnya, mereka beralih pada sumber-sumber produk yang berasal dari ‘tanaman pertanian dan hewan piaraan’. Hanya masyarakat lokal yang berada di hulu (Punan) yang masih memiliki kelimpahan sumber-sumber produk liar (tumbuhan dan satwa) dari hutan.

Selanjutnya, implikasi dari penelitian ini adalah menjadi tantangan lebih lanjut bagi para pembuat keputusan, karena dengan memahami nilai-nilai penting yang ada di hutan, maka dokumentasi kegiatan ini dapat dipakai guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan konservasi sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Di dalam strategi konservasi keanekaragaman hayati yang sekarang ini sedang dilaksanakan, ditegaskan bahwa pelaksanaan konservasi *KEHATI* tidak akan berhasil tanpa ada peran serta dari masyarakat lokal yang harus didukung oleh pemerintah lokal dan pusat. Pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati tidak akan berhasil tanpa ada peran serta masyarakat lokal (BAPPENAS, 2003). Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pakai untuk memberikan suatu rekomendasi, terutama sebagai dasar pertimbangan implikasi kegiatan *logging* secara lebih baik, yaitu dengan mempertimbangkan nilai-nilai penting hutan bagi masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati. Selain itu dengan memahami kepentingan lokal, maka dapat

juga di pakai sebagai pertimbangan di dalam perencanaan penggunaan lahan dan alternatif pelaksanaan konservasi yang lebih baik

#### DAFTAR PUSTAKA

- MacKinnon, K., Hatta, G., Hakim, H., Mangalik, A. 1996. The ecology of Kalimantan. Indonesian Borneo. The Ecology of Indonesia series III. Periplus Editions (HK) Ltd. 872p.
- Sardjono, M.A., Samsuedin, I. Traditional Knowledge and Practice of Biodiversity Conservation. The Benuaq Dayak Community of East Kalimantan, Indonesia. *in* Colfer, C.J.P. and Byron, Y. (eds.) 2001. People managing forests. The links between human well-being and sustainability. Resources for the future, Washington DC., USA. 447p.
- Sellato, B. 2001. Forest, resources and people in Bulungan. Elements for a history of settlement, trade and social dynamic in Borneo, 1880-2000. CIFOR, Bogor, Indonesia. 183p.
- Sheil, D., Liswanti, N., van Heist, M., Basuki, I., Syaefuddin, Samsuedin, I., Rukmiyati, Agung, M. 2003. Local priorities and biodiversity in tropical forest landscapes: asking people what matters. *Tropical Forest Update*. 13:1.  
<http://www.itto.or.jp/newsletter/Newsletter.html>.
- Sheil, D. 2002. Biodiversity Research in Malinau. *In*: CIFOR. Technical Report, Phase I (1997-2001). Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest. ITTO Project PD 12/97 Rev.1 (F). CIFOR, MOF and ITTO Bogor, Indonesia. 168p.
- Sheil, D., Puri, R., Basuki, I., van Heist, M., Wan, M., Liswanti, N., Rukmiyati, Sardjono, M.A., Samsuedin, I., Sidiyasa, K., Chrisandini, Permana, E., Angi, M.A., Gatzweiler, F., Johnson, B., Wijaya, A. 2002. *Exploring Biological Diversity, Environment and Local People's Perspectives in Forest Landscapes*. Center for International Forestry Research, Ministry of Forestry and International Tropical Timber Organization, Bogor, Indonesia. 101p.
- Uluk, A., Sudana, M., Wollenberg, E. 2001. Ketergantungan masyarakat Dayak terhadap hutan di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. CIFOR, Bogor, Indonesia.

- Wollenberg, E.K. 2001 Incentives for collecting gaharu (fungal-infected wood of *Aquilaria* spp.; Thymelaeaceae) in East Kalimantan. *Economic Botany* 55 (3): 444-456. The New York Botanical Garden Press, Bronx, New York, USA.
- Wulffraat, S., Samsu. 2000. An overview of the biodiversity of Kayan Mentarang National Park. WWF-Indonesia K M project, Samarinda, Indonesia. 154p.